

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengelolaan Aset Daerah

2.1.1 Definisi dan Konsep Pengelolaan Aset Daerah

Pengelolaan aset daerah adalah proses yang melibatkan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengawasan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pembangunan wilayah. Aset daerah mencakup segala bentuk kekayaan milik pemerintah yang berwujud maupun tidak berwujud, yang digunakan untuk pelayanan publik serta mendukung kegiatan pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pelaporan dan pengawasan aset.

Howard C. Builta (dalam Jolicoeur & Barrett, 2005), menjelaskan bahwa manajemen atau pengelolaan aset adalah proses memaksimalkan nilai properti atau portofolio properti mulai dari akuisisi hingga disposisi, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemiliknya. Konsep ini mencakup perencanaan strategis, analisis investasi, analisis operasional dan pemasaran, serta penentuan posisi aset di pasar sesuai dengan tren dan kondisi pasar.

Manajemen aset daerah memainkan peran penting dalam pembangunan daerah dengan memastikan bahwa aset digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan aset daerah yang tepat dapat menghasilkan:

1. Pertumbuhan ekonomi

Dengan mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan aset publik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah. Sebagai contoh, studi di Provinsi Yogyakarta menunjukkan bahwa distribusi aset publik yang dioptimalkan dapat secara signifikan mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah (Khoirudin et al., 2021).

2. Pelayanan publik yang efisien

Manajemen aset yang efektif memastikan bahwa layanan publik diberikan secara efisien. Hal ini termasuk pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas yang penting untuk pelayanan masyarakat, seperti institusi kesehatan dan pendidikan. Penerapan metode Manajemen Aset Berbasis Risiko (RBAM), seperti yang dibahas dalam sebuah studi, dapat meningkatkan manajemen inventaris dan meningkatkan daya tanggap terhadap fluktuasi permintaan, sehingga mendukung penyediaan layanan publik yang efisien (Fajar et al., 2023).

3. Transparansi dan akuntabilitas

Praktik manajemen aset yang tepat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Hal ini membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan mendukung tugas-tugas utama dan fungsi pemerintah (Fajar et al., 2023).

Aset bergerak, seperti alat berat, merupakan komponen penting dari aset daerah. Aset-aset ini sangat penting untuk berbagai pekerjaan dan layanan publik, termasuk konstruksi, pemeliharaan, dan tanggap darurat. Pemanfaatan aset bergerak yang efektif dapat menghasilkan:

a. Peningkatan kepentingan publik

Aset bergerak seperti alat berat sangat penting untuk proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengelolaan limbah, dan tanggap bencana. Penggunaan aset-aset ini secara efisien akan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran, sehingga secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Peningkatan pendapatan daerah

Pengelolaan dan pemanfaatan aset bergerak yang tepat juga dapat berkontribusi pada pendapatan daerah. Sebagai contoh, alat berat yang dipelihara dengan baik dan digunakan secara efisien dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan masa pakai aset, yang mengarah pada penghematan biaya dan pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi pemerintah daerah (Basri, 2021).

c. Dukungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peran strategis aset daerah, termasuk aset bergerak, dalam mendukung pendapatan anggaran daerah ditekankan dalam literatur. Manajemen aset yang efektif memastikan bahwa aset-aset tersebut digunakan dengan cara yang memaksimalkan nilai dan kontribusinya terhadap anggaran daerah (Basri, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah adalah proses vital yang mendukung pembangunan daerah dengan mengoptimalkan penggunaan aset tetap dan aset bergerak. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik. Pengelolaan aset bergerak yang efektif, seperti alat berat, sangat penting untuk proyek-proyek kepentingan publik dan meningkatkan pendapatan daerah.

2.1.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Aset

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan aset sangat krusial untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang ada.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian oleh Ratmono & Rochmawati (2018) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang masih mengalami masalah dalam pengelolaan aset tetap, termasuk ketidakcocokan antara visi misi daerah dengan pengadaan aset, serta rendahnya kontribusi aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah dalam hal pengelolaan aset.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Dewata et al. (2023)

menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk mencegah masalah financial distress yang dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan adanya sistem yang transparan, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan aset daerah, sehingga mendorong akuntabilitas pemerintah.

Pemerintah daerah juga berperan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendukung optimalisasi pengelolaan aset. Sumarno & Rossieta (2022) mengidentifikasi beberapa masalah dalam pengelolaan aset tetap di Pemerintah Provinsi Riau, seperti kurangnya profesionalisme sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan aset.

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, regulasi juga memainkan peran penting. Noviyati & Khoirudin (2023) mencatat bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan aset. Kebijakan ini harus diimplementasikan dengan baik agar pengelolaan aset dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah juga harus aktif dalam melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap aset yang dimiliki. Penelitian oleh Wicaksana et al. (2021) menunjukkan bahwa inventarisasi, penggunaan, dan pemeliharaan aset berpengaruh terhadap optimalisasi aset tetap. Dengan melakukan inventarisasi secara berkala, pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi aset dan merencanakan pemanfaatannya dengan lebih baik.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Kurniati menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan aset tetap, mengingat banyak kendala yang dihadapi terkait dengan penyalahgunaan aset dan kurangnya insentif bagi pengelola (Kurniati et al., 2017). Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset.

Pemerintah daerah juga perlu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk memaksimalkan pemanfaatan aset. Penelitian oleh Alvionita et al. (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan di Kota Gorontalo sudah terlaksana, namun masih ada kendala dalam penilaian aset yang dapat mempengaruhi PAD. Kerjasama dengan pihak ketiga dapat membantu dalam penilaian dan pemanfaatan aset yang lebih efektif.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, pemerintah daerah harus memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kondisi sebenarnya dari pengelolaan aset. Muktar (2020) menekankan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang dominan dalam APBD, sehingga pengelolaan aset yang baik akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Tinjauan pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan aset sangatlah penting. Melalui kebijakan yang tepat, pengawasan yang ketat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2 Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. SIM mengintegrasikan komponen teknologi, manusia, dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen informasi di berbagai sektor (Laudon & Laudon, 2019).

Ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen (SIM) mencakup berbagai aspek pengelolaan informasi dalam organisasi. SIM bertugas mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar organisasi. Setelah data

tersebut dikumpulkan, SIM kemudian mengolahnya menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang telah diolah ini disimpan secara sistematis, sehingga mudah diakses dan digunakan kembali di masa mendatang. Selain itu, SIM juga berperan dalam mendistribusikan informasi kepada para pemangku kepentingan yang membutuhkannya, baik di dalam maupun di luar organisasi (Turban & Pollard, 2013).

Fungsi utama dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung berbagai aktivitas manajerial, seperti perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. SIM berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan bagi manajer untuk membuat keputusan yang lebih efektif. Selain itu, SIM mempercepat proses komunikasi, memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien di dalam organisasi. SIM juga berfungsi untuk menyediakan kontrol operasional, membantu organisasi memantau kinerja operasional secara real-time. Dengan memproses data secara otomatis, SIM mengurangi potensi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan (Laudon & Laudon, 2020).

Dalam pengelolaan aset, Sistem Informasi Manajemen membantu dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan cara mengelola informasi terkait aset, seperti pemantauan kondisi aset, jadwal pemeliharaan, dan perencanaan penggantian aset. SIM memungkinkan organisasi untuk memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh aset yang dimiliki, baik fisik maupun digital, serta memastikan pemanfaatannya secara maksimal (Laudon & Laudon, 2020).

Manfaat SIM dalam pengelolaan aset:

1. Pemantauan aset yang efisien

SIM membantu dalam melacak lokasi, kondisi, dan umur pakai aset secara real-time, sehingga organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan perawatan atau penggantian dengan tepat.

2. Optimisasi pemanfaatan aset

Dengan informasi yang lengkap, SIM membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan aset sehingga tidak ada aset yang menganggur atau tidak dimanfaatkan dengan baik.

3. Perencanaan pemeliharaan

SIM dapat mengatur jadwal pemeliharaan berkala berdasarkan data historis dan kondisi aset, mengurangi risiko kerusakan yang tidak terduga dan memperpanjang umur pakai aset (Turban et al., 2013).

4. Pengambilan keputusan yang lebih baik

Dengan SIM, manajemen dapat membuat keputusan berbasis data tentang pembelian, peremajaan, atau penghapusan aset yang tidak lagi ekonomis (Laudon & Laudon, 2020).

2.3 Digitalisasi Pengelolaan Aset Alat Berat

Digitalisasi dalam pengelolaan aset, khususnya dalam sektor penyewaan alat berat, menjadi semakin penting di era modern ini. Dengan meningkatnya kebutuhan akan alat berat dalam berbagai proyek konstruksi dan industri, digitalisasi menawarkan solusi yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan metode pengelolaan manual. Dalam konteks ini, penting untuk memahami urgensi digitalisasi, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan manual, serta bagaimana digitalisasi dapat mengatasi masalah-masalah tersebut.

Urgensi digitalisasi dalam pengelolaan aset terlihat dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kumara & Ariana (2023), dijelaskan bahwa alat berat merupakan sumber daya penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi, dan pengelolaan yang efisien dapat mengurangi biaya operasional. Dengan menerapkan sistem digital, proses pemantauan dan pengelolaan alat berat dapat dilakukan secara real-time, sehingga meminimalkan waktu yang terbuang dan meningkatkan produktivitas. Digitalisasi juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat, yang sangat penting untuk analisis kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan aset secara manual adalah kurangnya integrasi dan transparansi dalam proses. Penelitian oleh Denibetri menunjukkan bahwa sistem pengelolaan alat berat yang masih manual sering kali

menghadapi masalah dalam hal pemantauan dan kontrol, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan (Denibetri et al., 2023). Dalam sistem manual, informasi sering kali tidak tersedia secara langsung, sehingga mempersulit manajer untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat. Digitalisasi dapat mengatasi masalah ini dengan menyediakan platform yang memungkinkan akses informasi secara langsung dan terintegrasi.

Selain itu, pengelolaan manual sering kali rentan terhadap kesalahan manusia. Dalam penelitian oleh Septiani et al. (2019), diungkapkan bahwa kesalahan dalam pencatatan dan pemantauan aset dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dengan sistem digital, banyak proses yang dapat diotomatisasi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Misalnya, sistem informasi penyewaan alat berat dapat secara otomatis mencatat setiap transaksi, memantau penggunaan alat, dan menghasilkan laporan yang diperlukan tanpa intervensi manual yang berisiko.

Digitalisasi juga memberikan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan kolaborasi. Dalam konteks penyewaan alat berat, sistem digital memungkinkan berbagai pihak, termasuk penyewa, penyedia, dan manajer proyek, untuk mengakses informasi yang sama secara bersamaan. Hal ini sangat penting dalam proyek besar yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Penelitian oleh Budiana et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem yang terintegrasi dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi proses penyewaan. Dengan akses yang lebih baik, semua pihak dapat berkolaborasi dengan lebih efektif, mengurangi risiko kesalahan komunikasi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Namun, meskipun digitalisasi menawarkan banyak manfaat, ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan dari pihak manajemen dan karyawan. Banyak organisasi masih terikat pada metode tradisional dan mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi baru. Penelitian oleh Iriandi et al. (2022) menunjukkan bahwa adopsi teknologi baru sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan di kalangan karyawan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang memadai dan menjelaskan manfaat digitalisasi untuk mendorong adopsi yang lebih luas.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah biaya awal untuk implementasi sistem digital. Meskipun dalam jangka panjang digitalisasi dapat menghemat biaya, investasi awal untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan dapat menjadi beban bagi banyak organisasi. Penelitian oleh Firda menunjukkan bahwa meskipun ada biaya awal yang signifikan, manfaat jangka panjang dari peningkatan efisiensi dan pengurangan kesalahan dapat jauh melebihi biaya tersebut (Firda et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk melakukan analisis biaya-manfaat sebelum memutuskan untuk beralih ke sistem digital.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan aset, terutama dalam sektor penyewaan alat berat, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, manfaat jangka panjang dari digitalisasi jauh lebih besar daripada biaya dan kesulitan awal yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan perusahaan penyewaan alat berat harus mempertimbangkan untuk mengadopsi sistem digital guna meningkatkan pengelolaan aset mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.4 Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik, termasuk penyewaan aset yang melibatkan pihak ketiga, merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa sumber daya publik dikelola secara efisien dan efektif. Dalam konteks ini, transparansi merujuk pada keterbukaan informasi mengenai pengelolaan aset, sedangkan akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pengelola aset dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dan hasil dari aset tersebut kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset publik tidak dapat diabaikan. Menurut Aversano & Christiaens (2014), laporan keuangan pemerintah harus mencerminkan pengelolaan aset yang baik, di mana informasi yang jelas dan akurat mengenai aset publik sangat penting bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Transparansi membantu menciptakan kepercayaan antara

pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai aset publik, mereka dapat lebih aktif dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah, sehingga mendorong pengelolaan yang lebih baik.

Akuntabilitas juga merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan aset publik. Ebrahim (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pengelola aset dalam menjelaskan penggunaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan. Dalam konteks penyewaan aset, akuntabilitas menjadi lebih kompleks karena melibatkan pihak ketiga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menetapkan mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa pihak ketiga juga bertanggung jawab atas penggunaan aset yang disewakan. Hal ini dapat dilakukan melalui kontrak yang jelas dan ketentuan yang mengatur penggunaan aset, serta melalui audit dan evaluasi berkala terhadap kinerja pihak ketiga.

Salah satu tantangan dalam pengelolaan aset publik adalah kurangnya regulasi yang mengatur akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam konteks penyewaan aset kepada pihak ketiga. Susanto Machmud et al. (2023) menekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan aset sangat penting untuk memastikan bahwa aset dikelola dengan baik dan akuntabel. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pengelolaan aset dapat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan korupsi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Dalam pengelolaan aset publik, terutama yang melibatkan penyewaan, penting untuk memiliki sistem pelaporan yang baik. Biondi & Lapsley (2014) mengemukakan bahwa laporan yang transparan dan akuntabel dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan aset. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, pemerintah dapat lebih mudah mengawasi penggunaan aset dan memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Transparansi dan akuntabilitas juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset. Ketika informasi mengenai aset publik tersedia secara terbuka, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset dapat lebih

mudah berkolaborasi dan berkomunikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Yang & Gao (2024) yang menunjukkan bahwa sistem informasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset publik. Dengan adanya transparansi, semua pihak dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan aset, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan kinerja keseluruhan.

Namun, tantangan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi. Schillemans (2015) mencatat bahwa manajer publik sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas, terutama ketika mereka merasa bahwa sistem yang ada tidak mendukung transparansi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan pelatihan yang diperlukan bagi pegawai untuk memahami pentingnya kedua aspek ini.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik, termasuk penyewaan aset yang melibatkan pihak ketiga, sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan transparansi, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pengelola aset bertanggung jawab atas tindakan mereka. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas akan membawa manfaat jangka panjang bagi pengelolaan aset publik dan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Optimalisasi Pemanfaatan Aset dan Peningkatan PAD

Penelitian mengenai kontribusi sistem informasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset telah menjadi fokus perhatian di berbagai daerah. Salah satu penelitian yang relevan adalah yang dilakukan oleh Sofyan et al. (2021) yang menganalisis pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2017 hingga 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sewa BMD secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan PAD, di mana sistem informasi yang baik

memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pemantauan aset. Dalam penelitian tersebut, Sofyan et al. menemukan bahwa dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam mengelola aset yang dimiliki. Sistem informasi memungkinkan pemantauan real-time terhadap penggunaan dan penyewaan aset, sehingga meminimalkan potensi kerugian akibat penyalahgunaan atau pengabaian aset. Selain itu, sistem informasi juga memfasilitasi proses pelaporan yang lebih akurat dan transparan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Subintarto juga menunjukkan pentingnya sistem informasi dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi yang berkontribusi pada PAD. Dalam analisisnya, Subintarto & Wahyudi (2023) menekankan bahwa sistem informasi yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi yang belum tergali, serta mempermudah proses pemungutan pajak. Dengan demikian, optimalisasi pajak dan retribusi melalui sistem informasi dapat meningkatkan PAD secara signifikan.

Akib et al. (2023) dalam penelitiannya juga menyoroti strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi di Kota Kendari. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang efisien dalam pengelolaan pajak dan retribusi dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi pendapatan yang ada. Dengan sistem informasi yang baik, pemerintah dapat melakukan analisis data yang lebih mendalam, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan PAD.

Lebih lanjut, penelitian oleh Alisman et al. (2023) menunjukkan bahwa laba dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga berkontribusi terhadap PAD. Dalam konteks ini, sistem informasi yang baik diperlukan untuk memantau kinerja BUMD dan memastikan bahwa laba yang dihasilkan dapat dioptimalkan. Dengan adanya sistem informasi yang transparan, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengevaluasi kinerja BUMD dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap PAD.

Mawaddah & Nazmel Nazir (2023) dalam penelitian mereka juga menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Mereka menekankan pentingnya sistem informasi dalam mengelola dan memantau penerimaan pajak dan retribusi, sehingga pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam merencanakan dan melaksanakan strategi pengelolaan aset yang optimal. Dengan sistem informasi yang baik, pemerintah dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap data penerimaan, sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa tantangan dalam pengelolaan aset secara manual dapat menghambat peningkatan PAD. Penelitian oleh Sudarmana & Sudiarta (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan manual sering kali menghadapi masalah dalam hal akurasi data dan efisiensi proses, yang dapat mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang baik menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan PAD.

Tinjauan pustaka tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem informasi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi aset. Dengan penerapan sistem informasi yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, memaksimalkan potensi pendapatan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Oleh karena itu, investasi dalam sistem informasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan tersebut.

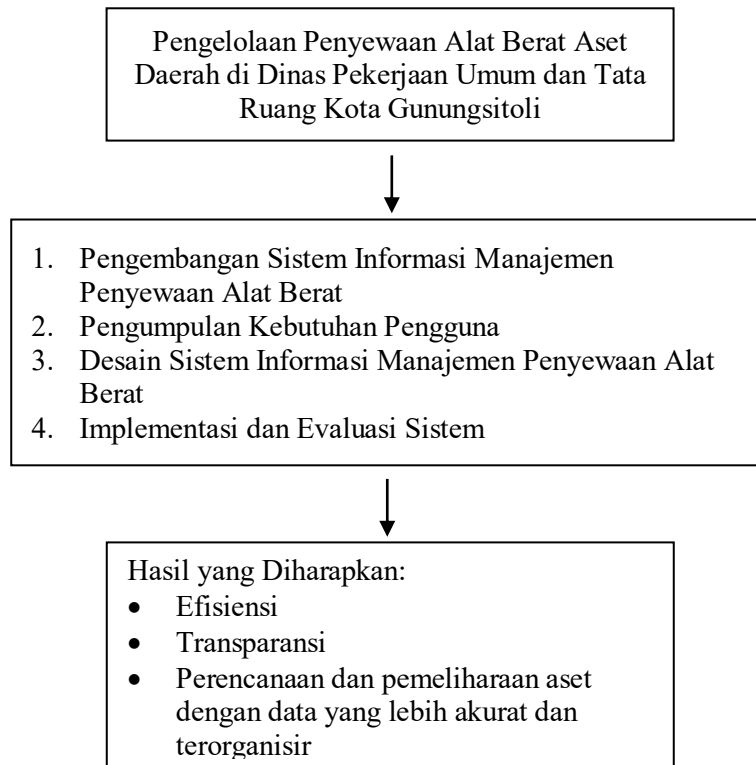
2.6 Penelitian Terdahulu

- a. Ferbi (2020) - Sistem Informasi Manajemen Penyewaan Alat Berat di PT Suriaman Sentosa. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi manajemen penyewaan alat berat di PT Suriaman Sentosa. Penelitian menggunakan kerangka PIECES untuk menganalisis masalah seperti kesalahan informasi terkait jam operasional dan kurangnya informasi perawatan alat berat. Sistem berbasis web yang dikembangkan dengan PHP dan MySQL berhasil menyelesaikan masalah pengelolaan penyewaan,

meningkatkan efisiensi, akurasi informasi, dan mempermudah pemantauan serta pelaporan terkait penyewaan alat berat.

- b. Moreta, Eka Sally (2024) - Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan Bermotor Daerah Wisata Bandung. Penelitian ini fokus pada perancangan sistem informasi penyewaan kendaraan bermotor di daerah wisata Bandung untuk meningkatkan efisiensi dan layanan pelanggan. Sistem ini dibangun menggunakan metode SDLC dan berbasis web dengan PHP dan MySQL. Hasilnya, sistem berhasil meningkatkan efisiensi penyewaan dan akurasi dalam pelacakan inventaris kendaraan.
- c. Aini, Syarifah (2022) - Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat Berbasis Web pada PT. Akta Trisad. Penelitian ini mengembangkan sistem informasi penyewaan alat berat berbasis web untuk PT. Akta Trisad. Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah penyewaan berulang, kesulitan mencari data, dan penyebaran informasi yang terbatas. Sistem informasi yang dibangun menggunakan metode prototyping ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan penyewaan alat berat dan mempercepat penyampaian informasi.
- d. Denibetri, Fransiska Risa (2023) - Sistem Informasi Pengelolaan Alat Berat (Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak). Penelitian ini mengembangkan sistem informasi pengelolaan alat berat untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Penelitian menggunakan metode RAD (Rapid Application Development) dan menghasilkan sistem yang mempermudah pengelolaan penyewaan, perawatan, dan pendataan alat berat secara real-time, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan alat berat serta pemasukan daerah.
- e. Alifa, Aldi (2022) - Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat Berbasis Web pada PT. Orang Kreatif Eksis Tangerang. Penelitian ini merancang sistem informasi berbasis web untuk mempermudah penyewaan alat berat di PT. Orang Kreatif Eksis. Sebelumnya, proses penyewaan dilakukan secara manual, yang membatasi waktu dan kesempatan bagi pelanggan untuk memesan alat. Dengan sistem baru berbasis PHP dan MySQL, pelanggan dapat memesan alat berat kapan saja dan dari mana saja, serta perusahaan dapat meningkatkan pelayanan pelanggan.

2.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah terkait pengelolaan penyewaan alat berat aset daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Gunungsitoli. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya efisiensi dan transparansi dalam proses penyewaan, serta masih dilakukannya pendaftaran, pemesanan, dan pemantauan alat secara manual. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan, penundaan, dan keterbatasan akses informasi secara real-time bagi para pengguna dan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, sistem informasi manajemen yang terintegrasi dipandang sebagai solusi yang dapat mendukung peningkatan efisiensi operasional serta transparansi dalam pengelolaan aset tersebut.

Langkah awal yang dilakukan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna, baik dari pihak internal seperti staf administrasi dan pengelola aset, maupun dari pihak eksternal seperti masyarakat atau perusahaan yang menggunakan layanan penyewaan alat berat. Identifikasi

kebutuhan ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan fungsional serta non-fungsional kedua kelompok pengguna. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, sistem informasi yang dirancang diharapkan memiliki fitur-fitur utama yang mencakup pendaftaran dan pemesanan alat berat secara digital, pemantauan status penyewaan secara real-time, serta mekanisme pelaporan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

Setelah sistem ini diterapkan, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Evaluasi dilakukan dengan mengukur bagaimana sistem informasi tersebut mampu mempercepat proses administrasi penyewaan, mempermudah akses informasi, serta mendukung perencanaan dan pemeliharaan aset secara lebih baik. Hasil yang diharapkan dari pengembangan sistem ini adalah peningkatan efisiensi operasional melalui pengurangan waktu dan biaya yang diperlukan dalam pengelolaan penyewaan alat berat, peningkatan transparansi dengan akses informasi yang lebih terbuka dan akurat, serta dukungan terhadap pemeliharaan aset dengan data yang lebih terorganisir dan terstruktur.